

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM dianggap strategis karena mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga sering menjadi bagian dari sektor informal yang berfungsi memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang sulit menjangkau pasar formal. Sebagian besar UMKM berkembang dengan keterbatasan modal dan sumber daya manusia, sehingga tidak jarang menghadapi hambatan dalam memperluas usaha maupun menembus pasar yang lebih besar. Meskipun demikian, UMKM memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan kemampuan berinovasi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan pasar secara cepat (Firdausya & Ompusunggu, 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025), sektor UMKM diharapkan menjadi *critical engine* bagi pertumbuhan nasional, mengingat kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang

dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan kriteria tertentu. Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp50 juta dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Usaha kecil ditandai dengan modal antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omzet Rp300 juta sampai Rp2 miliar per tahun, sedangkan usaha menengah memiliki modal Rp500 juta hingga Rp10 miliar serta omzet tahunan berkisar Rp2 miliar hingga Rp50 miliar (Wahidiyah et al., 2025).

Dalam kondisi perekonomian global yang semakin berkembang dan penuh tantangan, kinerja keuangan menjadi salah satu aspek utama untuk menilai tingkat efektivitas suatu entitas usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mencapai sasaran bisnisnya. UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah (Martadinata & Pasek, 2024). Sebagai unit usaha yang bersifat mandiri, UMKM pada umumnya mampu menjalankan kegiatan usahanya tanpa bergantung secara langsung pada pemerintah, meskipun tetap berada dalam lingkup kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, khususnya oleh pemerintah daerah (Atmaja et al., 2020). Kinerja keuangan yang baik menjadi faktor penting yang membantu perusahaan mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah berbagai perubahan kondisi serta tantangan ekonomi global yang terus berkembang (Sasmita, 2023). Namun demikian, banyak pelaku UMKM masih lebih memusatkan perhatian pada aktivitas operasional sehari-hari dibandingkan penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai. Dalam praktiknya, pengelola UMKM juga kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi selama kegiatan operasional usaha (Yuliatwati & Yudiantara, 2022). Kinerja keuangan UMKM dalam penelitian ini tidak hanya

dinilai berdasarkan besarnya omzet yang diperoleh, tetapi juga dilihat dari kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, seperti ketertiban pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, serta kemampuan usaha dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam menopang perekonomian nasional karena berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan pendapatan. Namun, berdasarkan laporan Isu Sepekan yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (2023), kinerja keuangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu masalah utama adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) belum berjalan optimal. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan UMKM masih rendah, sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing. Selain itu, hasil survei yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pasca pandemi Covid-19, sebanyak 77% UMKM mengalami penurunan pendapatan, 88% kehilangan permintaan produk, dan 97% kehilangan nilai aset. Angka ini mencerminkan lemahnya kemampuan UMKM dalam mengelola arus kas dan menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Masalah arus kas yang tidak terkontrol menyebabkan menurunnya kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang, terutama pada

sektor pariwisata yang sangat bergantung pada tingkat kunjungan wisatawan (Lisnawati, 2023)

Melakukan pencatatan keuangan yang baik dan efektif sangatlah penting, karena jika UMKM ingin mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan dan pemerintah untuk pengembangan usahanya, UMKM tersebut perlu melakukan pencatatan keuangan agar lembaga keuangan yang ingin memberikan pembiayaan bisa menilai kinerja keuangan mereka. Menurut Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan bahwa sebanyak 69,5% pelaku UMKM belum memiliki akses ke kredit perbankan (Tempo, 2025).

Sektor pariwisata merupakan sektor padat karya, banyak sekali manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor ini, seperti akomodasi, penginapan, restoran, dan transportasi (Purnamawati, 2021). Di sektor pariwisata, tantangan kinerja keuangan menjadi lebih spesifik karena sifat musiman industri ini. Permintaan yang tinggi pada masa liburan atau event budaya menyebabkan lonjakan pendapatan, namun pada musim sepi, banyak pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan. Ketidakseimbangan antara periode pemasukan dan pengeluaran tersebut membuat manajemen keuangan menjadi isu yang krusial. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan kas pada UMKM menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu menjaga likuiditas dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bertahan di pasar yang kompetitif. Manajemen kas yang tepat tidak hanya memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk menangani pengeluaran operasional harian, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk melakukan investasi dalam pengembangan usaha (Yusbardini, 2025).

Arus kas yang stabil merupakan fondasi utama untuk memastikan kelangsungan operasional UMKM. Arus kas yang masuk secara signifikan saat musim ramai perlu diimbangi dengan perencanaan pengeluaran yang efisien agar dapat digunakan untuk mengatasi musim sepi atau dialokasikan untuk pengembangan usaha jangka panjang. UMKM yang sehat bergantung pada kondisi keuangan yang stabil karena keuangan merupakan sumber utama untuk menjalankan aktivitas operasional usaha (Purnamawati et al., 2023). Kebangkrutan usaha sering kali disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam mengelola arus kas, kurangnya disiplin dalam pencatatan keuangan, serta minimnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Utami (2021) menemukan bahwa meskipun sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, hampir 70% pelaku UMKM di Indonesia masih belum memiliki sistem pengelolaan arus kas yang terstruktur dan berbasis teknologi (Khaled et al., 2025).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak signifikan terhadap pariwisata dan sektor ekonomi terkait lainnya (Adnyani & Purnamawati, 2024). Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya di sektor pariwisata, masih menghadapi kesulitan dalam manajemen keuangan dan pencatatan transaksi secara sistematis meskipun sudah dibantu dengan teknologi. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan pemahaman dan akses terhadap sistem akuntansi yang sederhana dan aplikatif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diperkenalkan sejak tahun 2018. Standar ini dirancang agar pelaku UMKM, meskipun tanpa latar belakang akuntansi

profesional, tetap dapat menyusun laporan keuangan dengan format yang mudah dipahami, relevan, dan dapat diandalkan untuk pengambilan Keputusan (IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2025).

Penerapan SAK EMKM secara optimal diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan UMKM, sehingga memperbesar peluang untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, standar ini juga menjadi alat strategis dalam mengukur kinerja keuangan secara objektif dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data (Yani & Syarli, 2025). Keputusan bisnis (finansial) yang tepat bergantung pada laporan keuangan yang dibuat sesuai standar akuntansi sehingga menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Damayanti et al., 2023). Sayangnya, adopsi standar ini masih rendah, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang belum memadai. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana dan sumber daya (Rusmini et al., 2026)

. Beberapa studi menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan SAK EMKM antara lain adalah minimnya pelatihan yang bersifat aplikatif, kurangnya pendampingan teknis dari institusi keuangan atau akademik, serta belum adanya sistem insentif yang mendorong pelaku usaha untuk patuh pada standar akuntansi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi UMKM dalam melakukan edukasi dan asistensi teknis secara berkelanjutan. Namun, penerapan SAK EMKM dan pengelolaan arus kas yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek teknis

akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Di sisi lain, dalam konteks sosial dan budaya, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis seperti pencatatan keuangan atau manajemen kas, tetapi juga oleh nilai-nilai lokal yang tertanam dalam praktik bisnis masyarakat salah satunya yaitu budaya *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan nilai budaya masyarakat Hindu di Bali (Darmawan et al., 2024). Filosofi *Tri Hita Karana* menjadi prinsip hidup yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam tiga hubungan utama: hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), hubungan antar sesama manusia (*Pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Nilai-nilai ini secara tidak langsung telah membentuk etika bisnis masyarakat Bali, termasuk dalam menjalankan usaha di sektor pariwisata.

Dalam konteks UMKM pariwisata, implementasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* tidak hanya dipahami sebagai pedoman sosial dan budaya, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku pengelolaan usaha. Nilai *Parahyangan* tercermin dalam tanggung jawab moral dan kejujuran pelaku usaha, termasuk dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan. Nilai *Pawongan* tercermin melalui hubungan harmonis dengan pelanggan dan mitra usaha, yang berdampak pada tingkat kepercayaan, kelancaran transaksi, serta stabilitas arus kas. Sementara itu, nilai *Palemahan* mendorong praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga berimplikasi pada pengendalian biaya dan keberlangsungan operasional usaha. Perilaku pengelolaan usaha yang terbentuk dari internalisasi nilai-nilai tersebut berhubungan dengan kualitas

pengelolaan keuangan UMKM, yang pada akhirnya tercermin dalam kinerja keuangan yang efektif dan efisien (Reditiasari et al., 2023).

Berbagai kajian pada lembaga ekonomi berbasis adat di Bali menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial dan budaya, tetapi juga berperan dalam membentuk tata kelola dan perilaku pengelolaan keuangan lembaga. Nilai *Parahyangan* diwujudkan melalui tanggung jawab moral dan komitmen sosial pelaku usaha terhadap komunitas adat, yang berimplikasi pada tingkat kepercayaan dan legitimasi sosial lembaga. Nilai *Pawongan* tercermin dalam hubungan harmonis antara pengelola usaha dengan masyarakat dan tenaga kerja lokal, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, stabilitas transaksi, serta pengendalian risiko usaha. Sementara itu, nilai *Palemahan* diwujudkan melalui perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan wilayah usaha, yang berkontribusi pada kesinambungan operasional dalam jangka panjang. Internalisasi nilai-nilai tersebut membentuk sistem pengelolaan usaha yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga berdampak pada kinerja keuangan lembaga secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, *Tri Hita Karana* tidak diposisikan hanya sebagai konsep filosofis atau nilai normatif budaya Bali, melainkan sebagai nilai budaya yang diimplementasikan dalam praktik pengelolaan UMKM pariwisata. Implementasi nilai *Tri Hita Karana* tercermin melalui perilaku usaha sehari-hari yang meliputi hubungan harmonis dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan dengan sesama manusia seperti pelanggan dan mitra usaha (*Pawongan*), serta kepedulian terhadap lingkungan usaha (*Palemahan*). Implementasi nilai-nilai tersebut selanjutnya diukur secara kuantitatif dan dianalisis pengaruhnya terhadap

kinerja keuangan UMKM. Implementasi nilai *Tri Hita Karana* dalam praktik UMKM pariwisata dapat menjadi diferensiasi unik yang memperkuat citra usaha. Ketika pelaku usaha menjunjung nilai kejujuran, gotong royong, dan kepedulian lingkungan, maka usaha tersebut bukan hanya dinilai dari produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan tren global di mana wisatawan kini semakin tertarik pada pengalaman pariwisata yang autentik, berkelanjutan, dan sarat makna spiritual atau sosial. UMKM yang mengintegrasikan nilai *Tri Hita Karana* ke dalam strategi bisnisnya memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik segmen wisatawan yang mencari pengalaman yang lebih dari sekadar konsumsi.

Dalam konteks nasional, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Selain itu UMKM berkontribusi pada dalam memperkuat daya saing nasional, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di tengah digitalisasi, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya adopsi teknologi, serta persaingan yang semakin ketat (Saragih et al., 2025). Namun, permasalahan klasik seperti lemahnya sistem pencatatan keuangan, belum terstandarnya manajemen arus kas, dan rendahnya internalisasi nilai-nilai budaya lokal dalam strategi usaha masih menjadi tantangan utama, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Indawati (2025) mengungkapkan bahwa ketiadaan pencatatan keuangan yang memadai

menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat (Indawati et al., 2025).

Di tingkat lokal, Kabupaten Buleleng di Bali merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM pariwisata berbasis budaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 830.000 jiwa dan karakter geografis yang mencakup wilayah pesisir hingga dataran tinggi, Buleleng menawarkan keberagaman destinasi wisata yang meliputi wisata bahari, agro, spiritual, dan budaya (Sariada, 2025). Tercatat ada lebih dari 9.780 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1  
Data Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng

<b>Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng</b>		
<b>Berdasarkan Data DISDAGPERINKOPUKM Buleleng</b>		
<b>Tahun 2024</b>		
<b>No</b>	<b>Sektor UMKM</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1	Sektor Perdagangan	<b>2.432</b>
2	Sektor Perindustrian	<b>897</b>
3	Sektor Pertanian	<b>914</b>
4	Sektor Jasa	<b>5.537</b>
<b>Total UMKM</b>		<b>9.780</b>

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, 2024)

UMKM pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, terutama di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM di wilayah Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro, khususnya penjual souvenir dan pakaian khas wisata, belum melakukan pencatatan keuangan secara

sistematis. Sebagian pelaku usaha bahkan tidak mencatat transaksi penjualan maupun pemasukan, sementara sebagian lainnya telah berupaya melakukan pencatatan keuangan, namun pendapatan yang diperoleh masih belum mencapai target yang telah ditentukan, sehingga mereka kesulitan menutup beban operasional seperti sewa tempat dan biaya listrik. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, yang menyebabkan sulitnya memantau arus kas dan menilai kondisi keuangan secara akurat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) serta pengelolaan arus kas yang efektif, yang pada akhirnya berdampak terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan citra destinasi wisata, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan wisatawan, berkurangnya transaksi, serta penurunan pendapatan UMKM di sekitar kawasan wisata.

Padahal, penerapan SAK EMKM memiliki peran penting dalam membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang sederhana namun akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025), SAK EMKM dirancang agar entitas kecil dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal tanpa kompleksitas yang berlebihan. Penelitian Yumiko & Tjakrawala (2024) menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha. Sementara itu, penelitian Yusbardini (2025) serta Vivianti & Hermanto (2025) menegaskan bahwa pengelolaan arus kas yang baik berperan penting dalam menjaga likuiditas, menekan risiko keuangan, dan memperkuat keberlangsungan

usaha. Namun kenyataannya, banyak UMKM di Kabupaten Buleleng belum menerapkan sistem pencatatan kas yang teratur, sehingga mereka kesulitan mengatur perputaran modal dan menghadapi penurunan pendapatan pada musim sepi wisatawan. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun sebagian UMKM telah melakukan pencatatan, pengelolaan kas yang belum efisien dan lemahnya strategi keuangan menyebabkan pendapatan belum mampu menutupi seluruh beban usaha secara optimal.

Fenomena lemahnya pengelolaan keuangan dan etika bisnis di sektor pariwisata juga tercermin dalam kasus Air Terjun Sekumpul, yang sempat menjadi sorotan publik pada November 2023. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, wisatawan mengaku diminta membayar tiket masuk sebesar Rp300.000, jauh di atas tarif resmi yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan Satpol PP, diketahui bahwa terdapat empat pos loket tidak resmi yang memungut tiket secara sepihak di jalur menuju Air Terjun Sekumpul. Pos-pos tersebut ternyata dikelola oleh oknum perorangan, bukan oleh pengelola resmi destinasi wisata. Akibat kejadian tersebut, pemerintah daerah menutup sementara pos tidak resmi tersebut dan berkomitmen memperbaiki sistem tata kelola keuangan destinasi agar lebih transparan dan sesuai aturan. Fenomena ini mencerminkan rendahnya penerapan nilai-nilai budaya *Tri Hita Karana*, khususnya aspek *Pawongan* (harmoni antar manusia) dan *Parhyangan* (integritas moral). Praktik semacam ini menimbulkan ketidakpercayaan wisatawan, menurunkan reputasi destinasi, serta berdampak tidak langsung

terhadap penurunan pendapatan dan kinerja keuangan UMKM di sekitar lokasi wisata.

Adapun penelitian yang relevan dengan fenomena tersebut yaitu penelitian oleh Kustina & Arisanti (2022) yang menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kegiatan ekonomi mampu menciptakan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan melalui praktik usaha yang jujur, etis, dan berkelanjutan. Namun, ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, muncul praktik yang tidak transparan, seperti kasus di Air Terjun Sekumpul, yang tidak hanya mencederai harmoni sosial tetapi juga merugikan ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks inilah penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* menjadi relevan. Melalui *Pawongan* yaitu hubungan harmonis dengan sesama, UMKM dituntut untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang jujur dan transparan. Melalui *Palemahan* yaitu hubungan yang baik dengan alam sekitar, UMKM dapat meningkatkan daya tarik usahanya dengan menjaga kebersihan, menggunakan bahan lokal, dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Melalui *Parahyangan* yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, hal ini tercermin dalam keterlibatan UMKM pada kegiatan adat dan keagamaan yang mendukung identitas budaya Bali. Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng, baik pada tingkat UMKM maupun destinasi wisata menunjukkan bahwa rendahnya penerapan SAK EMKM, lemahnya pengelolaan arus kas, dan belum optimalnya implementasi nilai *Tri Hita Karana* merupakan permasalahan mendasar yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM pariwisata. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana ketiga

variabel tersebut berperan dalam meningkatkan transparansi, stabilitas, dan keberlanjutan keuangan UMKM di sektor pariwisata Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur tentang model kinerja keuangan UMKM yang tidak hanya berbasis pada prinsip akuntansi dan manajemen keuangan formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor kearifan lokal sebagai variabel penting. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping dalam merancang program peningkatan kapasitas, pelatihan akuntansi sederhana, serta integrasi nilai budaya dalam strategi bisnis UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek teknis dan kultural dalam menganalisis kinerja keuangan UMKM pariwisata. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan masih berfokus pada faktor keuangan formal, misalnya penelitian Rusnawati, Rusdi, dan Saharrudin (2022) yang menguji literasi keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Makassar. Penelitian Eka dan Rara (2023) yang menekankan pengaruh sikap keuangan, perilaku keuangan, dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Pemdes Ambengan. Selain itu, ada juga penelitian oleh Ayu dan Sinarwati (2025) yang membuktikan pengaruh tingkat suku bunga kredit, *non performing loan*, daya saing, dan kualitas pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Selat. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor keuangan teknis berperan penting dalam meningkatkan kinerja

keuangan, namun tidak melibatkan faktor budaya lokal sebagai variabel independen yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memasukkan *Tri Hita Karana* sebagai variabel independen berbasis *cultural* yang diuji secara empiris terhadap kinerja keuangan UMKM. Dengan pendekatan ini, penelitian memperluas kerangka teori *Resource Based View (RBV)*, karena selain menguji penerapan SAK EMKM dan pengelolaan arus kas sebagai kapabilitas teknis, juga menempatkan nilai-nilai lokal (*Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*) sebagai sumber daya internal yang tidak berwujud yang dapat menciptakan diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Konteks penelitian yang berfokus pada UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng, dengan fenomena nyata berupa minimnya pencatatan keuangan usaha, pola pengelolaan kas yang musiman, serta masalah kepercayaan wisatawan akibat praktik usaha yang kurang transparan, semakin memperkuat aspek kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pengaruh penerapan SAK EMKM, pengelolaan arus kas, dan internalisasi nilai *Tri Hita Karana* terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai interaksi antara aspek teknis dan kultural dalam menentukan keberhasilan UMKM pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng, antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman dan penerapan SAK EMKM oleh pelaku UMKM, yang berdampak pada keterbatasan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.
2. Pengelolaan arus kas yang belum optimal, terutama karena sifat musiman dari sektor pariwisata, menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
3. Belum terintegrasinya nilai-nilai budaya lokal *Tri Hita Karana* secara sistematis dalam strategi dan operasional bisnis UMKM, meskipun nilai tersebut diyakini dapat memperkuat citra dan keberlanjutan usaha.
4. Tantangan struktural di tingkat lokal, seperti minimnya digitalisasi, dukungan kebijakan, serta edukasi teknis kepada pelaku UMKM.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat dilakukan secara efektif, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali.
2. Variabel yang dikaji hanya mencakup penerapan SAK EMKM, pengelolaan arus kas, dan nilai budaya *Tri Hita Karana* sebagai variabel bebas.

3. Kinerja keuangan UMKM menjadi variabel terikat, yang diukur melalui persepsi pelaku usaha terhadap indikator seperti omzet, laba, efisiensi biaya, dan kemampuan menjaga likuiditas.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah secara langsung, akses pasar, maupun faktor makroekonomi lainnya.
5. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei kepada pelaku UMKM.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pengelolaan arus kas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah nilai *Tri Hita Karana* yang diimplementasikan dalam praktik bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng.

2. Menganalisis pengaruh pengelolaan arus kas terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng.
3. Menganalisis pengaruh implementasi nilai budaya *Tri Hita Karana* terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam:

- a. Menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi (SAK EMKM) dan manajemen arus kas terhadap kinerja keuangan UMKM.
- b. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal (*Tri Hita Karana*) ke dalam kerangka teori pengelolaan usaha, sehingga memperkaya perspektif sosial-budaya dalam akuntansi UMKM.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku UMKM: Memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan standar akuntansi, manajemen kas yang sehat, serta nilai budaya lokal dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha.
- b. Bagi pemerintah daerah: Memberikan dasar data dan informasi untuk merumuskan kebijakan pengembangan UMKM pariwisata yang berbasis budaya lokal dan sistem akuntansi yang terstandar.
- c. Bagi lembaga pendamping UMKM (universitas, koperasi, LSM): Menjadi referensi dalam menyusun program pelatihan, pendampingan,

dan penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam hal akuntansi keuangan serta pengelolaan berbasis nilai lokal.

